ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MASA OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 – 2014 DAN PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sajana Ekonomi
Jurusan Manajemen

Peminatan :

Manajemen Keuangan

Diajukan Oleh :

NOVITASARI

NIM : 1121103343

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

April 2015

LEMBAR PESETUJUAN

" ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MASA OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 – 2014 DAN PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 "

Diajukan oleh

NOVITASARI

NIM : 1121103343

Telah Disetujui Pemibimbing Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Widya Dharma Klaten

Pada Tanggal 17 April 2015

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Sutrisno Badri, M.Sc	**Jarot Prasetyo, SE,M.Si**
NIK 690 208 290	**NIK 690 301 251**

Mengetahui,

Ketua jurusan manajemen

Abdul Haris, SE MM. M.Pd
NIK 690 098 194

LEMBAR PENGESAHAN

" ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MASA OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 – 2014 DAN PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 "

Diajukan oleh

NOVITASARI

NIM : 1121103343

Telah Dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk memenuhi sebagai persayaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi

Pada Tanggal 24 April 2015

Ketua	**Sekretaris**
H. Arif Julianto SN,SE .Msi **NIK 690 301 250**	**Abdul Haris, SE. MM. MPd** **NIK 690 098 194**
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Sutrisno Badri, M.Sc **NIK 690 208 290**	**Jarot Prasetyo, SE,M.Si** **NIK 690 301 251**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN FAKULTAS EKONOMI

H. Arif Julianto SN,SE .M.Si
NIK 690 301 250

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: NOVITASARI
NIM	: 1121103343
Jurusan/ Program Studi	: EKONOMI MANAJEMEN
Fakultas	: EKONOMI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi

Judul	: ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MASA OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 – 2014 DAN PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

adalah sebenar-benarnya karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Klaten, 17 April 2015

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

A8D2EADF214441465

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(NOVITASARI)

PERSEMBAHAN

Suatu kebanggan bagi penulis yang telah yang telah menyelesaikan karya sederhana ini,dengan rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk :

- ♥ Mamahku tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan doa dalam setiap langkahku serta terkesan perjuangan membesarkan, membiayai, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi langkah awal didalam membahagian beliau.
- ♥ Keluarga khususnya bulek-bulekku, paklik-paklikku dan juga adek-adekku tercinta terima kasih atas doa, nasihat, motivasi, semangat dan kasih sayang yang kalian berikan kepada saya.
- ♥ Buat Om Ken dan Mb Susi sekeluarga terima kasih sudah membantu dan mendoakanku dalam penyelesain skripsiku ini.
- ♥ Geng Amburadul (Aminusafaroh A, Damar Tenang Sri S, Indah Sri RM, Mia Abriani) yang telah bersama-sama berjuang menempuh pendidikan di Universitas Widya Dharma selama empat tahun ini.
- ♥ Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen khususnya Rudi Jantan Prakoso, Angga Adi Nugroho, Yogy Pratomo, Triyono, Sigit Sukardi, Bambang Sigit Santoso, Amandita Indriana dan rekan-rekan satu angkatan 2011 yang telah bersama-sama berjuang menempuh pendidikan di Universitas Widya Dharma selama empat tahun ini.

- ♥ Rekan-rekan kost ARIMBI khususnya (Geris utami, Luluk Nur K, Aini Zahra, Fahmi Zaida, Wuri Kartika M, Nieta Ernawati, Mb Anjar), dan teman-teman kostku yang tidak bisa ku sebut satu persatu, yang telah memberikan doa dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
- ♥ Buat semua yang telah mendoakanku terima kasih atas doa dari kalian semua dalam penyelesaian skripsi ini.
- ♥ Almamaterku.

MOTTO

- *Apa yang kita yakini dengan sepenuh hati pasti suatu saat akan menjadi sebuah kenyataan yang indah. (penulis)*
- *Kehidupan bagaikan roda yang berputar kadang kita dibawah dan kadang kita diatas jadi kita tidak akan tau apa yang akan terjadi kepada kita esok hari*
- *Belajarlah dari sebuah kegagalan karana itu kunci sukses (penulis)*
- *Kegagalan bukan akhir dari semuanya, tapi kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan jika kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. (penulis)*
- *Janganlah menilai buku dari sampulnya, belum tentu isinya sama dengan sampulnya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2011 – 2014 Dan Proyeksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 ".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat ujian akhir guna mendapat gelar sarjana strata satu ekonomi di Universitas Widya Dharma Klaten. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bantuan, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.Arif Julianto SN, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, atas segala ijin dan dukungannya dan sebagai Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Haris, SE, MM. M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala ijin dan dukungannya.
3. Bapak Dr. Sutrisno Badri,SE,M.sc selaku Pembimbing Utama , yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Jarot Prasetyo,SE,M.si selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. PemKab Batang dan Ketua DPPKAD yang telah memberiak ijin untuk melakukan penelitian .
6. Ibu dan keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil serta semangat dalam bentuk apapun.
7. Sahabat perjuangan, Mahasiswa Jurusan Manajemen angkatan 2011.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga menjadi amal kebaikan Anda dan Allah SWT membalas dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Penulis menyadari meskipun masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. Dan diharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti diantaranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Klaten, 17 April 2015

Penulis

Novitasari

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL I

HALAM PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERYATAAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN MOTTO vii

KATA PENGATAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

ABSTRAK xvii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Manfaat Hasil Penelitian 9

D. Tujuan Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Otonomi Daerah 11

1. Pengartian Otonomi Daerah 11

2. Dasar Hukum Otonomi Dearah 12

3. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah 13

4. Tujuan Otonomi Daerah 16

5. Pemenatapan Pelaksanaan Otonomi Daerah 17

B. Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi 19

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 24

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29

E. Jenis Rasio Berdasarkan Data Yang Bersumber dari APBD 29

1. Kemandirian 30

2. Rasio Efektivitas 32

3. Analisis Trend 34

F. Penelitian Sebelumnya 36

BAB III. METODE PENELITIAN 40

A. Data Dan Sumber Data 40

1. Data Primer 40

2. Data Sekunder 40

B. Metode Pengumpulan Data 41

C. Kerangaka Pemikiran Teoritis 41

D. Jenis Rasio Berdasarkan Data Yang Bersumber Dari APBD 47

1. Kemandirian 47

2. Rasio Efektivitas 50

3. Analisis Trend 51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54

A. Gamabaran Umum Objek Penelitian 54

1. Kondisi Geografis 54

2. Pemerintah 56

3. Potensi Wilayah 59

4. DPPAKAD Kabupaten Batang 61

B. Deskripsi Data 66

C. Hasil Penelitian 68

1. Tingkat Kemandirian Kabupaten Batang 69

2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 81

D. Analisis proyeksi PAD tahun 2015-2019 84

1. Data Realisasi Penerimaan PAD 5 Tahun Terakhir 85

2. Menghitung Rata-rata Realisasi PAD 86

E. Pembahasan 89

1. Perkembangan Tingkat Kemadirian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010-2015 89

2. Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010-2014 94

3. Prediksi Perkembangan Kemandirian, Rasio Efektivitas tahun 2015-2019 97

BAB V. PENUTUP 100

A. Simpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Pola Kemandirian Dan Tingakat Kemampuan Daerah	32
Tabel 2.2	Efektivitas Keuangan Daerah	33
Tabel 3.1	Pola Kemandirian dan Tingkat Kemampuan Daerah	51
Tabel 3.2	Efektivitas Keuangan Daerah	52
Tabel 4.1	Data Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Batang	57
Tabel 4.2	Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Batang	66
Tabel 4.3	Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun 2010	70
Tabel 4.4	Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun 2011	72
Tabel 4.5	Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun 2012	73
Tabel 4.6	Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun 2013	75
Tabel 4.7	Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun 2014	76
Tabel 4.8	Tingkat Kemandirian Kabupaten Batang Tahan Anggaran	

2010-2014 78

Tabel 4.9 Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Kabupaten Batang Tahun 2010-2014 79

Tabel 4.10 Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemandirian Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015-19 80

Tabel 4.11 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010-2014 82

Tabel 4.12 Trend Rasio Efektivitas Kabupaten Batang Tahun Anggarn 2010-2014 83

Tabel 4.13 Proyeksi Rasio Efektivitas Kabuten Batang Taun Anggaran 2015-2019 84

Tabel 4.14 Data Realisasi Penerimaan PAD 2010-2014 86

Tabel 4.15 Data Perhitungan Proyeksi 87

Tabel 4.16 Proyeksi Penerimaan PAD Kabupaten Batang Tahun 2015-2019 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Realisai tahun

Lampiran 2 : Data Rekapitulasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

ABSTRAK

NOVITASARI, NIM. 1121103343, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2011-2014 Dan Proyeksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 Sampai 2019

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Batang. Studi kasus adalah penelitian yang mendalami mengenai unit sosial tertentu yang menghasilkan untuk jangka waktu tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada waktu tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu. Data runtut waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tertentu. Data yang digunakan data dalam bentuk tahunan, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dari data yang diolah, dilihat bahwa Target dan realisasi PAD Kabupaten Batang dari tahun 2010 – 2014 selalu mengalami peningkatan. Deviasi / selisih antara target dan realisasi PAD Kabupaten Batang dari tahun 2010 – 2014 rata rata sebesar 12,604%, sedangkan rata rata tingkat kemandirian Kabupaten Batang dari tahun 2010 – 2014 sebesar 10,238%, dan rata rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2010-2014 sebesar 112,604% Persamaan proyeksi dan realisasi PAD untuk tahun 2015 – 2019 adalah sebesar 101.265.308.370 yang berarti setiap tahun proyeksi PAD kabupaten Batang mengalami peningkatan sebesar 33.755.856.788 atau sebesar 33,33 %.

Kata Kunci : PAD Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah didasarkan pada kemampuan dan potensi daerah untuk mandiri secara ekonomi, artinya pada saat otonomi daerah, daerah yang bersangkutan harus mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintah didaerahnya termasuk menggaji pegawai yang sudah dilimpahkan dari pusat kepada daerah tingkat II termasuk juga Kabupaten Batang.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.

Pertama, Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*task assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Berkenaan dengan desentralisasi fiskal tersebut ada tiga pilihan. *Pertama,* memberikan seluruh basis pajak kepada daerah kemudian mewajibkannya untuk menyetor sebagian dari hasil pajak tersebut kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. *Kedua,* merupakan kebalikan dari pilihan pertama, yaitu seluruh kewenangan perpajakan berada pada pemerintah pusat, kemudian membiayai pemerintah daerah dengan sistem hibah atau

transfer, baik melalui bagi hasil seluruh penerima maupun melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu. *Ketiga,* merupakan kombinasi dari pilihan satu dan dua, yaitu memberi beberapa kewenangan pemungutan pajak kepada daerah. Apabila terjadi ketimpangan vertikal karena pemberian kewenangan ini maka untuk melengkapi eksistensi pajak daerah tersebut diberikan pula bagi hasil atau transfer dari pemerintah pusat.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah diberi Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambun Kewajiban itu

bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2)

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Hal ini pun seperti yang dicantumkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang beralaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak Langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011-2014 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut. harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekretariat Daerah Kabupaten Batang melalui APBD Tahun Anggaran 2010 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 644.772.288.739 dan

alokasi ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun mulai dari tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 820.066.813.501, 2012 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 933.943.656.710, 2013 mendapatkan alokasi anggaran belanja Rp. 1.086.627.383.076 dan tahun 2014 mendapatkan anggaran belanja Rp. 1.185.107.390.698. Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan adanya penambahan alokasi belanja langsung yang cukup signifikan. Dan pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan yang merupakan konsekuensi logis dan bersifat general dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan penambahan jumlah pegawai dan kesejahteraan pegawai.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, sudahlah disebut lengkap bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diukur kinerjanya. Dengan kelengkapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang telah ditetapkan dan dilaksanankannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah *(http:/www.feuhamka.com/artikel122.htm).* Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagi berikut ini :

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektifitas
3. Analisis trend

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti mengenai kinerja keuangan daerah di Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **" ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MASA OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 – 2014 DAN PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 "**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2011 – 2014 dan

prediksi tahun2015 sampai dengan tahun 2018?

2. Apakah kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2011 - 2014 itu efektif?
3. Apakah kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2011 – 2014 itu efisien?

C. Manfaat hasil penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang guna memperbaiki kebijakan keuangan daerah yang lebih baik.

2. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

   Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam mempraktekan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2011 –

2014 dan prediksi tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

2. Untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun Anggaran 2011–2014
3. Untuk mengetahui efisiensi kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Batang dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2011 – 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Batang yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata 10,238% untuk setiap tahun anggaran. hal tersebut masih di bawah 25% sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah *instruktif* yang berarti kemandirian Kabupaten Batang sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Tetapi jika dilihat perkembangan kemandirian Kabupaten Batang untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah.
2. Rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Batang selama

lima tahun anggaran (tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014) rata-rata sebesar 112,604% dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 2,65% setiap tahunnya. Dengan demikian pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima melebihi target yang ditetapkan.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah serta lebih meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba badan usaha daerah seperti PDAM.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebaiknya meningkatkan target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

3. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan pengukuran mengenai rasio keuangan daerah yang lain seperti rasio keserasian, rasio penyerapan dana tri wulan, debt service coverage ratio, rasio pertumbuhan, dan analisis kontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, A. Samudra 1995, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah,* Gramedia, Jakarta.

B, Hirawan, Susiyati 1990, "Peraturan perundang-Undangan Pajak dan Retribusi Daerah dilihat dari Manajemen Keuangan", disampaikan dalam rangka *seminar* sehari Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri 2003, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utan Luar Negri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Devas, Nick 1995, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Davey, KJ. 1998, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI press, Jakarta.

Gita Sugiarti 2002 Statistik I, Untag Semarang

Halim, Abdul 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Hariyadi, Jasagung dan Kifliansyah, dalam Halim, Abdul 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Ismail, Munawar 2001, *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*, Telaah Ekonomi Volume II.

Kartini kartono 2000, *statistik Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta.

Kesit Bambang Prakoso 2000, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta

Mangkoesoebroto, Guritno 1999, *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta.

Mardiasmo 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Munawir. S. 1992, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

Simajuntak, Robert, A. 1999, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, makalah disampaikan pada *Seminar* Nasional Flatron Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Padang.

Saragih, Juli Panglima 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiscal

nanangbudianas. 2013 *pengertian-kinerja-keuangan* blogspot.com

Subkan , 2010 , “ proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten batang tahun 2011-2015 “, *skripsi*, perpustakaan untang semarang.